

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA

#### 2.1 Visi Kementerian Agama

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kemenag mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

"Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"

Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
4. Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
6. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan

yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan. Yang dimaksud “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”.

## 2.2 Misi Kementerian Agama

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Renstra ini perlu dikutip sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

M

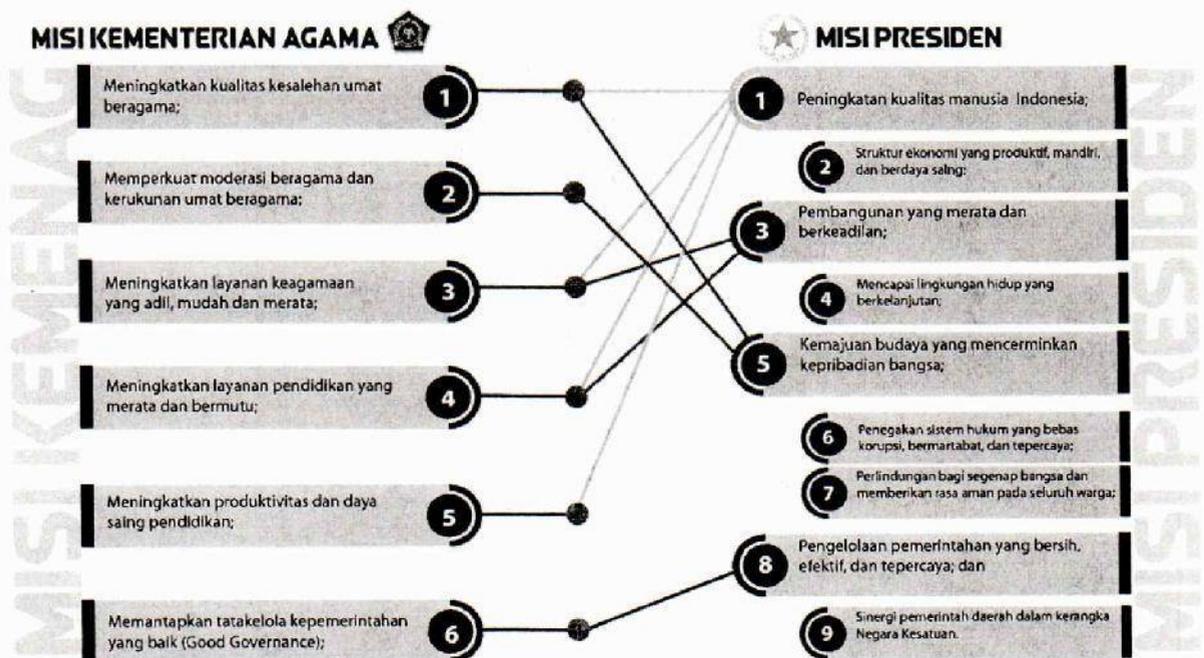
Dengan bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan, yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;  
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5);
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;  
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5)
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;  
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;  
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan  
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1)
6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).  
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8)

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kemenag tahun 2020-2024, Kemenag berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang agama, Kemenag merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kemenag akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan Khalik-Nya, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Kemenag terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang

ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang profesional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan sekaligus pelaksana dari semua misi yang dicanangkan. Dengan perpaduan seluruh misi yang dicanangkan, maka diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang visi Kementerian Agama akan dapat diwujudkan.



Gambar 2.1

Hubungan antara Misi Kemenag dengan Misi Presiden-Wakil Presiden

### 2.3 Tujuan Kementerian Agama

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kemenag menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas umat beragama menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;

M

4. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

#### 2.4 Sasaran Strategis Kementerian Agama

Dalam rangka mencapai 6 (enam) Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kemenag menetapkan 13 Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama pada tahun 2024 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.	Indeks kesalehan umat beragama.

2. Tujuan 2: Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.	Indeks kerukunan umat beragama.
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya.	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya.

3. Tujuan 3: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.	1. Indeks kepuasan layanan KUA; 2. Tingkat kepuasan layanan sertifikasi produk halal; dan

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		3. Indeks kepuasan layanan ibadah haji.
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan.

4. Tujuan 4: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Literasi; dan</li> <li>b. Numerasi.</li> </ol> </li> <li>2. Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membaca;</li> <li>b. Matematika; dan</li> <li>c. Sains.</li> </ol> </li> </ol>
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha;</li> <li>2. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;</li> <li>3. APK MTs/Wustha/SMPK/Madyama Widya Pasraman;</li> <li>4. APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman;</li> <li>5. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;</li> <li>6. APM MTs/Wustha/SMPK/Madyama Widya Pasraman;</li> </ol>

*M*

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		7. APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman; dan 8. APK PTK/Ma'had Aly.
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik.	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP.
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan.	1. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B; 2. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B; 3. Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B; dan 4. Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul.
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa.	Indeks karakter siswa.

5. Tujuan 5: Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas.	1. Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional; 2. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan; 3. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional; dan 4. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi.

M

6. Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.	1. Predikat opini laporan keuangan; dan 2. Nilai reformasi birokrasi.
SS13	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan ( <i>policy paper</i> ).

#### 2.5 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dalam pelaksanaan Renstra Kemenag Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kemenag dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran strategis. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 2.1.

W

Tabel 2.1

Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama	1. Intensitas Ritual 2. Kepedulian Sosial 3. Relasi antar manusia 4. Etika dan budi pekerti	Survei	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat
2.	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	1. Toleransi 2. Kesetaraan 3. Kerja sama	Survei	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Balitbang dan Diklat	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat
3.	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	1. Akomodatif terhadap budaya 2. Penurunan Konflik	Survei	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat

M

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
					Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Balitbang dan Diklat	
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	a. Indeks kepuasan layanan KUA	Alat ukur sesuai dengan Permenpan RB No. 14/2017: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana	Survei	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat

W

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		b. Tingkat kepuasan layanan produk halal	1. Registrasi 2. Sertifikasi	Survei Internal	BPJPH	Hasil Survei Internal BPJPH
		c. Indeks kepuasan layanan ibadah haji	1. Pendaftaran 2. Bimbingan manasik haji 3. Pemberangkatan 4. Prosesi ibadah haji 5. Pemulangan	Survei	Ditjen PHU	Hasil Survey Badan Pusat Statistik
5.	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	1. Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/ sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharma dana/ dana paramitha/ dana kebajikan) yang mendukung layanan pendidikan dan keagamaan 2. Jumlah dana sosial keagamaan ( zakat/sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/dharma	Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/ sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharma dana/ dana paramitha/ dana kebajikan) yang mendukung layanan pendidikan dan keagamaan: Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, BWI dan BAZNAS

W

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
			dana/dana paramitha/dana kebajikan)	sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharma dana/dana paramitha/ dana kebajikan)		
6.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	a. Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: 1) Literasi 2) Numerasi	1. Literasi 2. Numerasi	Survei	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Hindu	Kemendikbud/ Kemenag
		b. Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: 1) Membaca 2) Matematika 3) Sains	1. Membaca 2. Matematika 3. Sains	Survei	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Hindu	<i>OECD (Organisation For Economic Coopera-tion and Develop-ment)</i>
7.	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	a. APK RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman	1. Jumlah sisiwa RA/Pratama Widya Pasraman 2. Jumlah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman:	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik,	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen,

W

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Seminari/Nava Dhammasekha	penduduk usia 4 s.d 6	Jumlah penduduk usia 4 s.d 6 Tahun	Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, Ditjen Bimas Buddha, BPS
		b. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	1. Jumlah sisiwa MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 7 s.d 12	Jumlah siswa MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman: Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 Tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
		c. APK MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	1. Jumlah sisiwa MTs/Wustha/SMP TK/ Madyama Widya Pasraman 2. jumlah penduduk usia 13 s.d 15	Jumlah siswa MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman: Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 Tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
		d. APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 16 s.d 18	Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman : Jumlah penduduk usia 16 s.d 18 Tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik,

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
						Ditjen Hindu, BPS.
		e. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang berusia 7 s.d 12 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 tahun	Jumlah siswa MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang berusia 7 s.d 12 tahun: Jumlah Penduduk Usia 7 s.d. 12 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
		f. APM MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MTs/Wustha/SMP TK/ Madyama Widya Pasraman yang berusia 13 s.d 15 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 13 s.d 15 tahun	Jumlah siswa MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang berusia 13 s.d 15 tahun: Jumlah Penduduk Usia 13 s.d 15 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
		g. APM MA/Ulya/SMTK/SM AK/ Utama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK/SM AK/ Utama Widya Pasraman yang berusia 16 s.d 18 tahun 2. Jumlah	Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman yang berusia 16 s.d 18 tahun: Jumlah	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.

W

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
			Penduduk Usia 16 s.d 18 tahun	Penduduk Usia 16 s.d 18 tahun		
		h. APK PTK/Ma'had Aly	1. Jumlah sisiwa PTK/Ma'had Aly 2. Jumlah penduduk usia 19 s.d 23 tahun	Jumlah siswa PTK/ Ma'had Aly/PTK: Jumlah penduduk usia 19 s.d 23 Tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
8.	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	1. Jumlah guru yang memenuhi SNP 2. Jumlah siswa	Jumlah guru yang memenuhi SNP: Jumlah siswa	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
9.	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	a. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MI/Ula/	Jumlah MI/Ula/SDTK/A dhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B: Jumlah MI/Ula/	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik,

W

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
			SDTK/Adhi Widya Pasraman	SDTK/ Adhi Widya Pasraman		Ditjen Bimas Hindu
		b. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MTs/Wustha/SMP TK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman	Jumlah MTs/Wustha/S MPTK/Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B: Jumlah MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		c. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B: Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		d. Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	Jumlah PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul:	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik,	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen,

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
			2. Jumlah PTK/Ma'had Aly	Jumlah PTK/Ma'had Aly	Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
10.	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks karakter siswa	1. Religiusitas 2. Rasa kebangsaan 3. Integritas 4. Kemandirian 5. Gotong Royong	Survei	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Hasil Penelitian Badan Litbang dan Diklat
11.	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	a. Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	1. Jumlah PTK yang memiliki prodi/kelas internasional 2. Jumlah PTK	Jumlah PTK yang memiliki prodi/kelas internasional : Jumlah PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		b. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1	1. Jumlah lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	Jumlah lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas

W

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		tahun setelah kelulusan	2. Jumlah lulusan PTK	kelulusan: Jumlah lulusan PTK	Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		c. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	1. Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional 2. Jumlah publikasi ilmiah PTK	Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional : Jumlah publikasi ilmiah PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		d. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	1. Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional yang disitasi 2. Jumlah publikasi ilmiah PTK	Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional yang disitasi: Jumlah publikasi ilmiah PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
12.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	a. Predikat opini laporan keuangan	1. Kesesuaian dengan standar akuntansi	Mengguna-kan instrumen yang	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen	BPK

M

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
	yang efektif, transparan dan akuntabel		pemerintahan 2. Kecukupan pengungkapan ( <i>adequate disclosures</i> ) 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern	sudah dirumuskan oleh BPK	Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BPJPH	
		b. Nilai reformasi birokrasi	1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan 3. Penataan Organisasi/ Kelembagaan 4. Penataan Tatalaksana 5. Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Pengawasan 8. Pelayanan Publik	Mengkuna-kan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Kementerian PAN dan RB	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BPJPH	Kemenpan dan RB

M

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
13.	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan ( <i>policy paper</i> )	1. Jumlah penelitian yang dijadikan dasar kebijakan ( <i>policy paper</i> ) 2. Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan	Jumlah penelitian yang dijadikan dasar kebijakan ( <i>policy paper</i> ): Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan	Balitbang dan Diklat	Balitbang dan Diklat

Sumber: Biro Perencanaan, 2020

W

## 2.6 Nilai-nilai Kementerian Agama

Dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama dan pendidikan, Kemenag menetapkan lima nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh ASN pelaksana pembangunan. Nilai-nilai itu telah dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama. Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

### 1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam keimanan dan ketaqwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan nilai keimanan dan ketaqwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. membina kerukunan hidup beragama;
- g. tidak bertindak diskriminatif;
- h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

### 2. Integritas

Dalam nilai integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

M

- a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain;
- d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

### 3. Profesionalitas

Dalam nilai profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
- b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;
- c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
- e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu

anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;

- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
- g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat memengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

#### 4. Tanggung Jawab

Dalam nilai tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

Pelaksanaan nilai tanggung jawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

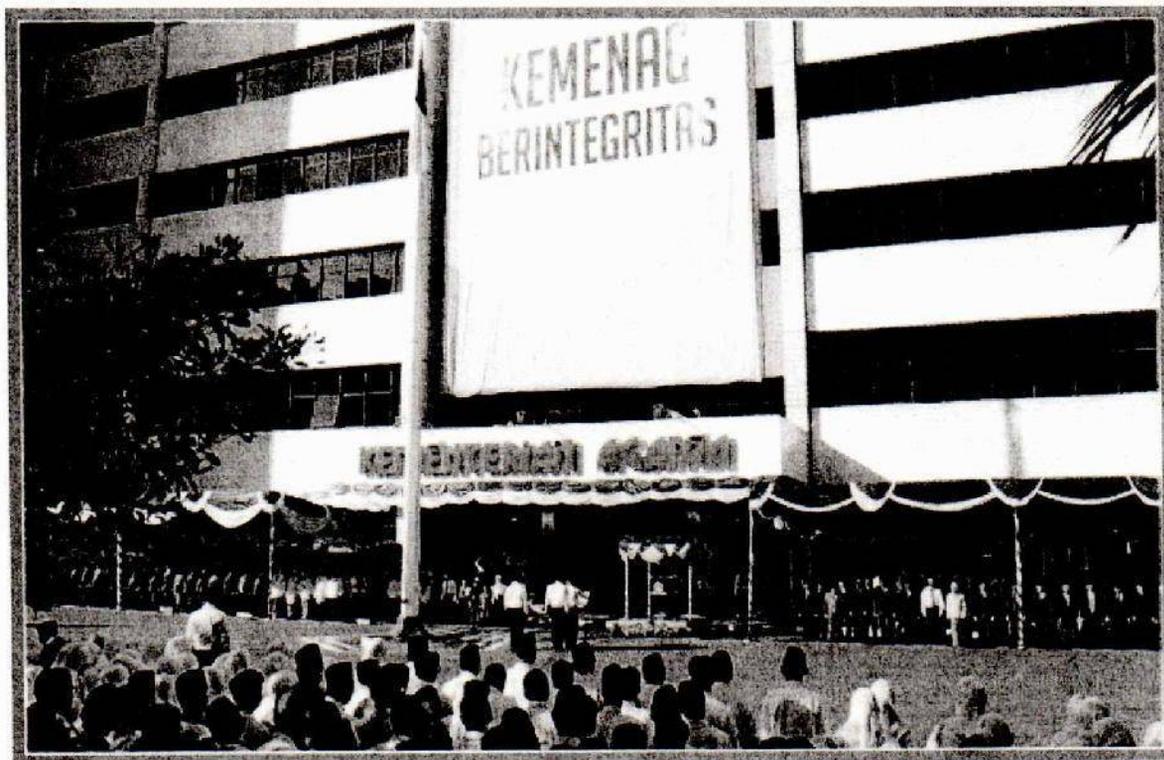
- a. mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan tugas secara patuh, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- d. memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama;
- e. melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;
- f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

5. Keteladanan

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.



Gambar 2.2

Pelaksanaan Upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Tahun 2015